

**STRATEGI *INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS WEST PAPUA*
(IPWP) DALAM MENGADVOKASI DUNIA INTERNASIONAL
TERKAIT ISU KONFLIK PAPUA**

Oleh

ROINCE WANDIKBO

Skrpsi

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusana Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Strategi *International Parliamentarians West Papua (IPWP)* Dalam Mengadvokasi Dunia Internasional Terkait Isu Konflik Papua

Oleh

ROINCE WANDIKBO

Papua merupakan daerah yang terletak di bagian timur Indonesia, mencakup separuh barat Pulau Nugini. Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang sangat beragam. Konflik di Papua berakar dari perbedaan pandangan terkait sejarah integrasinya ke Indonesia, khususnya setelah "*Act of Free Choice*" tahun 1969 yang kontroversial. Masalah ini diperparah oleh pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pendekatan keamanan yang dinilai tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh *International Parliamentarians West Papua (IPWP)* dalam mengadvokasi isu konflik Papua di tingkat internasional.

Penelitian ini, Menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* yang di perkenalkan oleh Keck dan Sikkink dalam buku berjudul "Activists Beyond Borders" pada tahun 1998. *TAN (Transnational Advocacy Network)* merupakan kelompok advokasi mandiri yang bekerja sukarela (*voluntary collective action*) dan melintas batas negara untuk mencapai kepentingan yang mereka anggap akan mempresentasikan kepentingan publik yang lebih luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pendekatan diplomasi, advokasi, dan penggunaan media yang digunakan oleh *International Parliamentarians West Papua (IPWP)* dalam mengadvokasi Konflik Papua Barat di panggung global.

Hasil penelitian ini, Menunjukkan bahwa *International Parliamentarians West Papua (IPWP)* mampu membingkai isu konflik Papua dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan penentuan nasib sendiri pada dunia internasional. Menggunakan Konsep *TAN (Transnational Advocacy Network)* dengan Pola Boomerang dan Empat Strategi utama (*Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics dan Accountability politics*). Dari Empat Strategi ini, yang efektif digunakan oleh *IPWP* adalah *Information Politics, Symbolic Politics dan Leverage Politics*. Sedangkan, *Accountability Politics*, kurang efektif karena Papua masih bagian dari wilayah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika konflik Papua serta strategi advokasi yang efektif dalam konteks hubungan internasional.

Kata kunci: Anggota *Parlemen Internasional Papua Barat (IPWP)*, *Transnasional Advocacy Network (TAN)*, Konflik Papua, Advokasi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Strategy of International Parliamentarians West Papua (IPWP) in Advocating the International World Regarding the Issue of Papuan Conflict

By

ROINCE WANDIKBO

Papua is a region located in the eastern part of Indonesia, covering the western half of New Guinea Island. This region has a wealth of natural resources and a very diverse cultural diversity. The conflict in Papua is rooted in differences of opinion regarding the history of its integration into Indonesia, especially after the controversial "Act of Free Choice" in 1969. This problem is exacerbated by human rights violations, discrimination, and a security approach that is considered ineffective. This study aims to analyze the strategies used by the International Parliamentarians West Papua (IPWP) in advocating the issue of the Papua conflict at the international level. This study uses the concept of the Transnational Advocacy Network (TAN) introduced by Keck and Sikkink in a book entitled "Activists Beyond Borders" in 1998. TAN (Transnational Advocacy Network) is an independent advocacy group that works voluntarily (voluntary collective action) and crosses national borders to achieve interests that they consider will represent the wider public interest. The method used in this study is qualitative and the main focus of this study is to identify the diplomatic approach, advocacy, and media use used by the International Parliamentarians West Papua (IPWP) in advocating the West Papua Conflict on the global stage. The results of this study indicate that the International Parliamentarians West Papua (IPWP) are able to frame the issue of the Papuan conflict in the context of human rights (HAM) and self-determination in the international world. Using the TAN (Transnational Advocacy Network) Concept with the Boomerang Pattern and Four Main Strategies (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics and Accountability politics). Of these Four Strategies, the most effective ones used by IPWP are Information Politics, Symbolic Politics and Leverage Politics. Meanwhile, Accountability Politics is less effective because Papua is still part of Indonesia. This study is expected to contribute to a broader understanding of the dynamics of the Papuan conflict and effective advocacy strategies in the context of international relations.

Keyword: International Parliamentarians West Papua (IPWP), Transnational Advocacy Network (TAN), Papuan Conflict, Advocacy, Human Rights

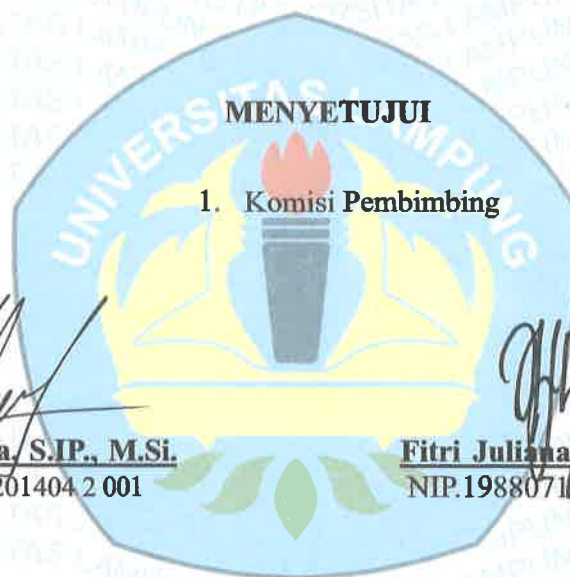
Judul Skripsi : ***Strategi International Parliamentarians
West Papua (IPWP) Dalam Mengadvokasi
Dunia Internasional Terkait Isu Konflik
Papua***

Nama Mahasiswa : **Roince Wandikbo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071059**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP.19870128201404 2 001

Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.
NIP.198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A

Penguji Utama : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali, arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Roince Wandikbo

NPM. 1916071059

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Roince Wandikbo, dilahirkan di Kampung Wollo, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 02 Mei 2002, yang merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Banas Wandikbo dan Ibu Dorina Doga . Penulis merupakan anak kelima dari Lima bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tingkat Taman Kanak-kanak di TK Hosana Said Wollo Kabupaten Jayawijaya. Penulis kemudian, melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar di SDN Inpres Dobonsolo, Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Sentani dan SMA YPPK Asisi Sentani , Kabupaten Jayapura.

Pada tahun 2019, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) Papua dan 3T yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknolog (Kemendiktisaintek). Semasa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis bergabung dalam berbagai organisasi kampus maupun diluar kampus seperti ; Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung (HMJ HI) , Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung (UKM KMK). Pada tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus sebagai divisi Kominfo. Selain itu, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Tenaga Sejahtera Wirasta Kota Bandar Lampung, pada bidang warisan Ketenagakerjaan TK CPMI periode juli – Agustus tahun 2022.

MOTTO

“Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord!”

(Jeremiah 17:7)

“God's plan cannot be limited by humans”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas Berkat dan Anugrah –
Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran
sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan
segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini
kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapa Banas Wandikbo dan Mama Dorina Doga

Terimakasih kedua orang tuaku tercinta atas segala bentuk dukungan yang
senantiasa memberikan kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap Langkah
perjalanan penulisan skripsi penulis, dan keyakinan yang tak pernah padam
bahwa penulis mampu. Skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya cinta kalian
dalam hidup penulis dan ucapan terimakasih penulis. Terimakasih atas kasih
sayang yang tak ternilai, pengorbanan yang tiada henti, dan keikhlasan yang
selalu mengiringi perjuangan penulis hingga bisa meraih gelar sarjana S-1

Kakak-kakaku Tersayang

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa Syukur, saya ingin
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kakak-kakakku tercinta: (Mape
Wandikbo.Almh), (Selly Wandikbo), (Maury Wandikbo.Almh), dan (Barley
Wandikbo). Terima kasih atas segala dukungan, doa dan kasih sayang yang
kalian berikan baik secara moril maupun materiil, selama perjalanan kuliah ini.

Terutama kakak Maury wandikbo (Almh), Terima kasih atas segala
pengorbanan, dalam membantu memenuhi kebutuhan kuliah penulis, tempat
penulis bersandar di saat sulit, tempat berbagi cerita di saat bingung, dan
teladan dalam menjalani hidup.

Serta
Seluruh pembaca

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan berkat-Nya yang begitu besar, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi International Parliamentarians West Papua (IPWP) dalam Mengadvokasi Dunia Internasional Terkait Isu Konflik Papua”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sekaligus menyelesaikan studi di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsiku dan Pembimbing akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya dan senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, masukan, nasihat, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan, dan juga di masa penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak atas segala dedikasinya selama ini.
6. Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsiku yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk ditemui, memberikan ilmu, saran, nasihat, serta motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam proses pengerjaan skripsi, yang selalu mengingatkan di

masa penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Dan membantu penulis dalam menyempurkan skripsi ini. Terima kasih banyak Yunda atas bantuan dan segala dedikasinya selama ini.

7. Khairunnisa Simbolon, S.IP.,M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, saran serta masukan kepada penulis. Dan Terima kasih juga Mba Nisa selalu memberikan dukungan semangat .
8. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih atas ilmu, motivasi, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Bapak Banas Wandikbo dan Mama kesayanganku Mama Dorina Doga, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, mendidik dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, membekali dengan segala hal baik, selalu mengajarkan kebaikan di setiap proses hidupku, selalu mengingatkan untuk taat kepada Tuhan, dan selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis.

Kepada Kakak-kakak Tersayang dan orang terfavorit ku, Almh. Maury Wandikbo Terima kasih selalu mendukung, memotivasi, mendorong dan juga yakin kepada penulis di masa skripsi ini, segala perjalanan ini mungkin tidak akan lengkap tanpa kehadiran kakak, semoga skripsi ini menjadi salah satu bukti kecil bahwa dukungan kakak tidak pernah sia-sia, Semoga kakak Bahagia.

10. Untuk Sahabtku tersayang Amelia Ahian Putri , Kehadiranmu bukan hanya sebagai teman, tapi juga sebagai saudara yang selalu menguatkan di saat aku lelah, mendengar di saat aku butuh tempat bercerita, dan mengingatkan di saat semangatku mulai hilang. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukunganmu yang tulus dari awal perkuliahaan hingga aku mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kita bisa terus saling mendukung dalam setiap langkah ke depan.
11. Untuk Teman hidupku, Dominggus Kosamah, tidak hanya menjadi teman hidup, tapi juga sahabat perjuangan di bangku perkuliahan. Terima kasih telah setia menemani setiap langkahku selama masa kuliah di tanah rantau. Di tengah segala kesibukan, lelah, dan tekanan tugas, kamu selalu ada—

mendukung, menyemangati, dan membuat semuanya terasa lebih ringan. Kamu hadir bukan hanya saat senang, tapi juga saat aku terpuruk. Terima kasih karena tidak pernah lelah percaya padaku, bahkan ketika aku mulai ragu pada diriku sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Semoga langkah kita terus seiring, bukan hanya dalam perjuangan pendidikan, tapi juga dalam kehidupan yang akan datang.

12. Untukmu sahabat Kecilku, Michelle Bilamo Kosamah, Terima kasih sudah menjadi alasan terindah bagiku untuk terus melangkah. Di setiap lembar skripsi ini, ada doa dan cinta yang kutulis sambil memikirkan masa depanmu.
13. Terima kasih kepada Aser Yosua Rumbrawer & Kristin F.Suebu yang telah menjadi teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan. Terima kasih atas canda tawa yang diberikan selama ini. Terima kasih telah memberikan banyak warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
14. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang tak pernah putus selama kita menempuh perjalanan ini jauh dari tanah kelahiran. Di tanah rantau, kita belajar banyak hal—bukan hanya soal kuliah dan tugas, tapi juga tentang hidup, bertahan, dan saling menguatkan. Kalian adalah bagian penting dari cerita perjuanganku, dari awal perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini bisa kuselesaikan. Terima kasih telah menjadi keluarga di perantauan. Semoga persahabatan dan semangat perjuangan kita terus hidup, meskipun nanti kita akan menempuh jalan masing-masing.
15. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar IKMAPAL (Ikatan Mahasiswa Papua Lampung) IKMAPAL bukan hanya sekadar organisasi, tapi telah menjadi rumah yang nyaman, rumah untuk bersuara dan rumah untuk mengajarkan arti solidaritas, kebersamaan, tanggung jawab, dan perjuangan mahasiswa Papua menghadapi tekanan sosial yang berlarut di tanah rantau.
16. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Bersama kalian, saya belajar bukan hanya teori dan analisis

hubungan antarnegara, tapi juga arti dari kerja keras, kesabaran, dan kebersamaan;

17. KKN Tanggamus, Delsya, Mutia, Faris, Hilda, Razka dan Deska terima kasih telah menemani penulis dan bermain selama berada di Lampung. Terima kasih telah memberikan semangat setiap bertemu dan menjadi teman cerita;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
19. Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih telah menemukan cara untuk kembali bangkit dan tidak menyerah dalam kondisi apapun yang terjadi selama proses penulisan skripsi.

Bandar Lampung, 02 Juli ,2025

Penulis

Roince Wandikbo

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual	22
2.3 Model Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Jenis dan sumber penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Kehadiran <i>International Parliamentarians West Papua</i> (IPWP) Dalam Konflik Papua	33
4.1.1 <i>International Parliamentarians West Papua</i> (IPWP)	33

4.1.2 Kehadiran International Parliamentarians West Papua (IPWP) Dalam Mengadvokasi Konflik di Papua	36
4.2 Strategi <i>International Parliamentarians West Papua</i> (IPWP) Dalam Mengadvokasi Konflik di Papua.....	43
4.2.1 <i>Information Politics</i>	46
4.2.2 <i>Symbolic Politics</i>	49
4.2.3 <i>Leverage Politics</i>	53
4.2.4 <i>Acountabitiy Politics</i>	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	v

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Peristiwa konflik Papua 2019 & 2020	4
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	16

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Demonstrasi Berbuntu Kerusuhan	5
Gambar 1.2 Pembentukan IPWP di Inggris 2008	7
Gambar 2.1 Pola Boomerang	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Logo <i>International Parliamentarians West Papua</i> (IPWP)	34
Gambar 4.2 Foto Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat	34
Gambar 4.3 Aksi Masa di Paniai, Papua	38
Gambar 4.4 Solidaritas NGO Pasifik	38
Gambar 4.5 Deklarasi Benny Wenda	39
Gambar 4.6 Pengangkatan Isu kemanusiaan Papua di forum PBB, 2022	40
Gambar 4.7 Presiden Jokowi meresmikan Gedung (PYCH) di Jayapura.....	42
Gambar 4.8 Berita Amnesty News	48
Gambar 4.9 Berita Jubi	48
Gambar 4.10 Bendera Bintang Kejora	50
Gambar 4.11 Benny Wenda Menggunakan Busana Adat Papua	51
Gambar 4.12 Dukungan Dari Parlemen Inggris dan Uni Eropa	54
Gambar 4.13 Dukungan dari negara -negara Pasifik	55
Gambar 4:14 Seruan untuk kunjungan PBB	55
Gambar 4:15 Deklarsi Westminster	56
Gambar 4.16 Dukungan dari Parlemen Skotlandia.....	56
Gambar 4:17 Empat Tipologi utama TAN	60

DAFTAR SINGKATAN

ACLED	: Armed Conflict Location And Event Data Project
BPS	: Badan Pusat Statistik
COIN	: Counter Insurgency
DOM	: Daerah Operasi Militer
EU	: European Union
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPWP	: International Parliamentarians West Papua
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ILWP	: International Lawyers For West Papua
IAID	: Indonesian Agency For International Development
KKB	: Kelompok Kriminal Bersenjata
MSG	: Melanesia Spearhead Group
MACFEST	: Melanesia Art And Culture Festival
MSP	: Scottish Member Of Parliament
NGO	: Non Governmental Organisation
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
OKT	: Operasi Keamanan Terpadu
OAP	: Orang Asli Papua
OHCHR	: Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights
OACPS	: Organisation Of African Caribbean And Pacific States
OTSUS	: Otonomi Khusus
PEPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat Papua
POLRI	: Polisi Republik Indonesia

PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PUPR	: Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
PYCH	: Papua Youth Creatif Hub
PLF	: Pacific Islands Forum
RLS	: Rata – Rata Lama Sekolah
SDA	: Sumber Daya Manusia
SNP	: Scottish National Party
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNPB	: Tantar Nasional Papua Barat
TAN	: Transinational Advocad Network
ULMWP	: United Liberation Movement For West Papua
UNPO	: Unrepresentasi Nations And Peoples Organitation

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan keberagaman agama, etnis, dan suku bangsa sebagai karakteristik utamanya. Salah satu provinsinya, Papua, dulunya merupakan bagian dari Hindia Belanda dan dikenal sebagai Nugini Belanda pada masa kolonial. Hubungan antara Papua dan pemerintah Indonesia telah mengalami ketegangan sejak tahun 1963, yaitu ketika wilayah Papua Barat mulai diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Proses integrasi ini bermula dari Perjanjian New York pada 1962 dan diperkuat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, yang kemudian disahkan oleh PBB lewat Resolusi No. 2504 pada tahun yang sama. Namun, kelompok separatis menganggap bahwa proses tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara menyeluruh. Mereka menilai bahwa integrasi semestinya dilakukan melalui pemilihan umum langsung, bukan hanya melalui perwakilan yang jumlahnya sangat kecil—hanya sekitar 0,2% dari populasi Papua saat itu—dan bahkan diduga dilakukan di bawah tekanan dari pemerintah Indonesia. (Pamungkas, 2017).

Meskipun banyak kontroversi dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak, hasil Pepera menetapkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Beberapa organisasi Papua tidak senang karena mereka percaya prosedur tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan keinginan sebenarnya dari populasi. Setelah Pepera, muncul gerakan-gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Hingga konflik bersenjata dan ketegangan politik antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua pun, mulai muncul. Dan terus berlanjut dengan berbagai insiden kekerasan,

pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpuasan politik dan sosial di wilayah tersebut. (Sucahyo, 2022). Salah satu periode paling intensif adalah DOM (Daerah Operasi Militer) yang diberlakukan pertama kali pada tahun 1969 untuk menanggapi perlawanan terhadap hasil pepera dan untuk menegakan otoritas pemerintah di wilayah tersebut. Namun DOM baru secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1980 sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas gerakan separatism, khususnya oleh Organisasi Papua Merdeka (Ardli Johan Kusuma, 2022).

Pada awal tahun 1980-an, ketika pemerintahan Soeharto meluncurkan Operasi Keamanan Terpadu (OKT) yang diberlakukan di beberapa wilayah di Papua. OKT bertujuan untuk memberantas separatisme dan pemberontak di Papua. Selama periode ini, militer diberi kekuasaan yang luas untuk menindas kelompok-kelompok separatis dan mereka dilaporkan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penangkapan sewenang-wenangnya, dan penyiksaan terhadap warga sipil. DOM Papua juga beroperasi dan berkampanye militer yang luas di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah pegunungan dan hutan belantara tempat kelompok-kelompok separatism sering kali bersembunyi (AL-Rehab, 2003).

UU No. 21 tahun 2001 disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 - perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan amandemen Perpu Nomor 1 Tahun 2008 - memperbarui klausul ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua melahirkan kebijakan otonomi khusus ini. Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa status masyarakat Papua masih memprihatinkan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-politik, dan budaya. Selain itu, masih terdapat sejumlah masalah, termasuk tindakan opresif terhadap warga dan pelanggaran hak asasi manusia. (S.Iryanti, 2014)

Walaupun, sudah menerima otonomi khusus bagi Papua seringkali, masih terjadi konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua. Tahun 2010-an, konflik di Papua tetap menjadi isu krusial yang melibatkan

dinamika politik, ekonomi, dan social hingga kegagalan otonomi khusus yang mana otsus yang diberikan kepada Papua pada awal 2000-an terus dipertanyakan efektivitasnya. Banyak pihak menilai kebijakan ini tidak berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan bagi masyarakat Papua. Elit lokal kerap dianggap memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan sendiri. (ST.Mambraku, 2015).

Sejak insiden penyerangan di Nduga pada akhir 2018 dan gelombang demonstrasi pada 2019, konflik di Papua semakin memburuk. Pemerintah hingga kini masih mengedepankan pendekatan keamanan dengan meningkatkan operasi militer dan kepolisian untuk menghadapi kelompok separatis bersenjata seperti TPNPB-OPM. Konsekuensinya, jumlah korban terus bertambah, mencakup aparat, anggota kelompok bersenjata, dan warga sipil. Pemerintah Kabupaten Nduga mengatakan pada tanggal 20 Desember 2018, bahwa empat orang yang diduga menjadi korban baku tembak antara kelompok bersenjata dan militer telah ditemukan. Selain itu, tim kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Nduga melaporkan pada tanggal 14 Agustus 2019, bahwa 182 pengungsi telah tewas di kamp-kamp, dibandingkan dengan 53 orang yang dikonfirmasi oleh pemerintah pusat. Kemudian, pada tanggal 10 Oktober 2019, lima jenazah ditemukan di dalam lubang yang tertutup tanah dan dedaunan. Pada tanggal 24 Desember 2019, Wentius Nimiangge, Wakil Bupati Nduga, mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas kekerasan yang terus terjadi terhadap warganya. (Tangguh Chairil, 2020).

Insiden rasis di Surabaya pada tahun 2019 yang mengakibatkan penangkapan empat puluh tiga mahasiswa Papua karena diduga melecehkan bendera Merah Putih, lambang negara, memicu kerusuhan di Papua. Di Papua dan Papua Barat, tragedi ini memicu gelombang demonstrasi massa selama sebulan. Lebih dari 30 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi selama beberapa protes. Pemerintah merespons dengan memblokir akses internet di seluruh Papua mulai tanggal 22 Agustus 2019, mengerahkan lebih dari 6.000 aparat TNI dan Polri, melarang aksi unjuk rasa, membatasi pengunjung asing, dan melakukan 733 penangkapan. Sebanyak 15.000 penduduk dievakuasi dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ketika situasi memburuk.

Sembilan anggota TNI, dua anggota Polri, dan 10 warga sipil terbunuh dalam 21 konflik kekerasan antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan kelompok pro kemerdekaan Papua sepanjang tahun 2019. Tahun berikutnya memiliki tingkat pertumpahan darah yang sama. Menurut data statistik dari Armed Conflict Location and Event statistics Project (ACLED), terdapat 100 peristiwa kekerasan di Papua dan Papua Barat antara 1 Januari dan 26 September 2020. Dari jumlah tersebut, 40 di antaranya adalah konflik bersenjata, 22 kerusuhan, dan 38 kekerasan terhadap warga sipil, yang secara keseluruhan mengakibatkan 57 korban jiwa. Sebaliknya, ada 96 peristiwa kekerasan pada tahun 2019 (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1. 2 Jumlah Peristiwa konflik Papua dan Papua Barat 2019 dan 2020

Konflik Papua	1 Januari-31 Desember 2019	1 Januari-26 September 2020
Peristiwa konflik (events)	96	100
• Pertempuran (<i>battles</i>)	27	40
• Kerusuhan (<i>riots</i>)	19	22
• Kekerasan terhadap warga sipil (<i>violence against civilians</i>)	50	38
Korban jiwa (<i>fatalities</i>)	145	57

Sumber: *Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED)*

Sumber: Dari berbagai sumber dan Diolah oleh peneliti

Data ini menunjukkan bahwa selama pemerintah mempertahankan pendekatan berbasis keamanan/ Mileterlistik dalam menangani konflik Papua, maka potensi berlanjutnya konflik dan bertambahnya korban akan terus meningkat. (Tangguh Chairil, 2020). Seiring dengan perang bersenjata, Papua telah mengalami peningkatan tajam dalam pelanggaran hak asasi manusia yang disponsori oleh negara. Pada tahun 2019, Komnas HAM, Papua menerima 159 laporan pelanggaran hak asasi manusia, dibandingkan dengan 68 laporan pada tahun 2018 dan 89 laporan pada tahun 2017. Selain itu, antara Maret 2018 dan 14 Mei 2020, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 26 insiden dugaan

eksekusi di luar hukum oleh aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua. Masalahnya menjadi lebih kompleks karena sejumlah kasus penting, termasuk kasus Paniai, Wasior, dan Wamena, belum terselesaikan.

Amnesty International Indonesia juga melaporkan pelanggaran lain kepada Komisi HAM PBB terkait situasi di Papua, termasuk pelanggaran atas hak berkumpul dan berserikat secara damai, diskriminasi rasial, pembatasan hak menentukan nasib sendiri, tidak adanya proses hukum yang adil bagi aktivis Papua, serta pemblokiran informasi ke dan dari wilayah Papua. Di sisi lain, kondisi para pengungsi dari Nduga yang hidup dalam keterbatasan turut memicu trauma berkepanjangan yang belum terselesaikan hingga kini.



Gambar 1. 1 Demonstrasi Berbuntut Kerusuhan, Wamena

Sumber ; BBC , 2023

Dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul "Peta Jalan Papua" atau *Papua Roadmap*, yang dilakukan oleh LIPI di bawah arahan Widjojo Muridan S. (2008) mengungkapkan empat elemen kunci yang menjadi penyebab kegagalan pembangunan dan konflik di Papua. Pertama, sejak tahun 1970-an, kerusuhan politik, kesenjangan ekonomi, dan inisiatif transmigrasi yang ekstensif telah mengakibatkan marginalisasi dan perlakuan buruk terhadap Orang Asli Papua (OAP). Kedua adalah ketidakmampuan negara untuk memajukan industri vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Ketiga, kurangnya koreksi sejarah dan pengakuan terhadap identitas politik rakyat Papua. Keempat, pemerintah telah gagal menegakkan kewajiban

moralnya terkait tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua di masa lalu. (Muridan S. Widjojo, 2008).

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2023 menunjukkan bahwa masalah pendidikan dasar di Papua sangat memprihatinkan. Tercatat ada sekitar 476.534 anak usia sekolah (7–24 tahun) yang tidak mengenyam pendidikan, atau sekitar 34,58% dari total penduduk usia sekolah di Tanah Papua. Rinciannya adalah 1.053.944 orang di Provinsi Papua dan 324.112 orang di Provinsi Papua Barat. Masalah ini semakin kompleks karena Papua juga mengalami kekurangan tenaga pengajar sebanyak 20.147 orang, dengan perincian: guru SD sebanyak 9.351 orang, SMP 5.402 orang, SMA 1.964 orang, SMK 1.676 orang, serta guru yang mendekati masa pensiun sebanyak 1.754 orang.

Selain itu, rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas menunjukkan rendahnya capaian pendidikan di Papua. Tidak satu pun kabupaten/kota di Papua yang memiliki RLS setara dengan jenjang pendidikan tinggi. Bahkan, 18 kabupaten memiliki RLS di bawah jenjang sekolah dasar, dan 16 kabupaten lainnya tidak mencapai tingkat sekolah menengah pertama. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, serta stagnasi dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketidakpuasan terhadap pembangunan juga diperparah oleh pelanggaran HAM, serta dampak negatif dari aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar yang belum memberi manfaat signifikan bagi masyarakat Papua. (Papua, 2023).

Berdasarkan data di atas, konflik Papua ini menjadi perhatian di dunia internasional hingga terbentuknya *International Parliamentarians West Papua* (IPWP). IPWP sendiri merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok politisi lintas partai dari seluruh dunia, yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. IPWP didirikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wenda dan diketuai bersama oleh politisi Inggris Andrew Smith dan Lord Harries. Andrew Smith juga merupakan Ketua Kelompok Parlemen Semua Partai Inggris untuk Papua Barat. IPWP, di luncurkan di gedung parlement, London (Inggris) pada tanggal 15 oktober 2008. IPWP terdiri

dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya. (IPWP, 2016)



Gambar 1. 2 Gambar pembentukan IPWP di Inggris tahun 2008
Sumber ; IPWP ,2016

Beberapa anggota parlemen lintas partai dari berbagai negara berkumpul untuk bergabung dengan *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP), sebuah kelompok global yang didedikasikan untuk mempromosikan hak-hak orang Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Benny Wenda, seorang pemimpin kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, membentuk kelompok ini bersama Andrew Smith dan Lord Harries, dua politisi Inggris, yang menjadi ketua bersama. Selain itu, Andrew Smith mengetuai Kelompok Parlemen Semua Partai di parlemen Inggris untuk Papua Barat. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Gedung Parlemen Inggris di London, IPWP sekarang memiliki sekitar 50 anggota dari berbagai negara, termasuk Inggris, Republik Ceko, Australia, Selandia Baru, Swedia, Vanuatu, dan Papua Nugini. (IPWP, 2016).

Setelah *International Parliamentarians For West Papua* (IPWP), didirikan beberapa peristiwa dan tindakan telah terjadi, baik terkait dengan negara Indonesia, masyarakat Papua, serta negara lain. Pada tanggal 23 februari 2022, pernyataan keras dari Komisi Uni Eropa. Presiden Carles Puigdemont serta Josep Borrell—yang menjabat sebagai Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk

Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan—telah menyampaikan bahwa Uni Eropa mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan akses kepada Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) agar dapat melakukan kunjungan resmi ke Papua Barat. Mereka juga menyerukan agar Indonesia memperpanjang undangan terbuka kepada seluruh Pelapor Khusus PBB dan pemegang mandat terkait isu HAM. (JubiTv, 2022).

Pada 1 februari 2022 Parlemen Belanda mengadakan sidang komite urusan luar negeri tentang Papua barat. Parlemen Belanda campur tangan dalam pertemuan penting dan menyerukan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, untuk melindungi Papua Barat dan mengatasi masalah hak asasi manusia yang mempengaruhi penduduk di wilayah ini. Pada 12 Mei 2022, jaringan baru anggota parlemen yang mendukung Papua Barat diluncurkan di Parlemen Eropa di Brussels. Pertemuan ini mengumumkan pembentukan cabang EU baru dari IPWP. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung komunike terbaru dari KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat. (IPWP, 2022).

Pada 18 Oktober 2023, IPWP menggelar pertemuan dengan parlemen Inggris dan kembali mendesak agar OHCHR diizinkan segera mengunjungi Papua Barat untuk melakukan pemantauan langsung. Kemudian pada 22 Januari 2024, IPWP memprakarsai *Deklarasi Brussels untuk Papua Barat* yang ditandatangani oleh sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara. Deklarasi tersebut berisi desakan agar pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan resmi dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua Barat. Dikarenakan Papua Barat menghadapi krisis kemanusiaan yang signifikan dan memerlukan perhatian internasional mendesak. Diperkirakan 60.000-100.000 orang Papua asli mengungsi. (Papua W. , 2023). Dukungan internasional terhadap isu HAM di Papua Barat terus meluas. Semakin banyak negara serta organisasi regional yang menyatakan keprihatinan terhadap berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, serta penolakan akses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kunjungan OHCHR. Beberapa di antaranya termasuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS),

yang sebelumnya dikenal sebagai ACP. Sehingga pemerintah Indonesia menolak legitimasi IPWP dan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk memperkuat kontrol politik dan keamanannya di Papua. Dampaknya, terjadi peningkatan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua, serta para pendukung hak asasi manusia di dalam dan luar negeri.

Sehingga, (*International Parliamentarians For West Papua*) IPWP telah memperkuat perhatian internasional terhadap isu Papua dan menekankan perlunya solusi yang lebih efektif untuk mengatasi konflik dan memperbaiki situasi di wilayah tersebut. Dan juga, IPWP telah memperkuat internasionalisasi isu Papua. Sehingga mendapatkan dukungan dari Negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Kepulauan Solomon, secara vokal menyuarakan isu Papua di forum internasional. Tidak hanya di forum-forum internasional namun, di Gereja –gereja Pasifik, media online, dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga berperan dalam internasionalisasi isu ini. akan tetapi, organisasi ini juga belum bisa untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua barat yang mana Kelompok separatisme di Papua masih dominan dan terlibat dalam aksi kekerasan. Dan konflik vertikal antara KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan TNI/Polri serta konflik horizontal yang melibatkan suku, ras, dan marga terus berlangsung. (Korwa, 2021).

Meskipun (*International Parliamentarians For West Papua*) IPWP berperan dalam mengangkat isu Papua secara internasional, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua masih kompleks dan memerlukan solusi yang lebih komprehensif. Semua pihak harus terus berupaya mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik dan memperbaiki kondisi di Papua. Munculnya IPWP juga memicu reaksi diplomatik dari pemerintah Indonesia terhadap negara-negara yang memberikan dukungan terhadap gerakan Papua. Penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi dan taktik dari *International Parliamentarians for west Papua* (IPWP). Dalam membangun dukungan internasional dan mendorong dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia dengan melibatkan mediator internasional. Dan penelitian ini menjadi

rekomendasi buat pemerintah Indonesia dan IPWP dalam melihat situasi yang terjadi sekarang. Dengan tujuan mencari solusi damai atas konflik papua yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik Papua, yang telah merentang selama beberapa dekade, menimbulkan dampak yang luas dan kompleks bagi masyarakat setempat serta secara global, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan entitas internasional. Salah satu entitas yang terlibat aktif dalam mengadvokasi kemerdekaan Papua adalah *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)*, sebuah organisasi internasional yang secara konsisten berupaya memperjuangkan hak-hak Papua di panggung dunia. Dengan melakukan dialog dan kampanye IPWP telah berhasil membangun kesadaran internasional dan mendapatkan dukungan untuk upaya penyelesaian konflik di Papua. Meskipun demikian, penelitian yang mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh IPWP masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman terhadap dinamika konflik Papua dan efektivitas upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti IPWP.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu Papua dan mendorong dialog yang lebih konstruktif menuju perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu adapun yang menjadi rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana *international parliamentarians west papua (IPWP)* dalam Mengadvokasi Dunia Internasional terkait dengan isu konflik papua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan kehadiran IPWP dalam mengadvokasi konflik papua.
2. Mendeskripsikan Strategi IPWP di dunia internasional terkait isu konflik papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Memperdalam pemahaman tentang strategi dan taktik yang digunakan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam mengadokasi dunia internasional terkait isu konflik Papua. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan teori dan konsep terkait diplomasi parlemen serta peran politisi lintas partai dalam menangani konflik di tingkat internasional.
2. Menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika konflik Papua dan bagaimana aktor-aktor internasional, seperti IPWP, berperan dalam memfasilitasi dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian damai konflik tersebut. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori perdamaian dan penyelesaian konflik di tingkat internasional.

b. Manfaat Praktis

1. 1. Memberikan panduan dan wawasan bagi pembuat kebijakan internasional, organisasi non-pemerintah, dan aktor politik lainnya tentang strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan luar negeri yang lebih efektif dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di wilayah Papua.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum, media, dan organisasi advokasi tentang peran penting yang dimainkan oleh IPWP dalam mengampanyekan isu konflik Papua. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang konflik Papua dan mendorong partisipasi lebih aktif dalam upaya perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Papua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait dengan topik yang sedang diteliti. Fungsi utama penelitian terdahulu adalah untuk menyediakan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian baru, membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, mengevaluasi metodologi yang telah digunakan sebelumnya, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan dan temuan sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dipelajari

Penelitian pertama berjudul "*Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN)*" oleh Muhammad Angga Ramdhan (2021), bertujuan menafsirkan penerapan model COIN melalui perspektif studi konflik dan hubungan internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi model COIN McCormick secara sempit tidak hanya gagal meredam konflik di Papua, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam konteks internasional. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya penafsiran ulang terhadap strategi COIN di Papua, dengan menekankan penyelesaian akar konflik secara menyeluruh alih-alih pendekatan eliminatif berbasis militer. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda namun terdapat persamaan dalam hal mengungkap strategi yang digunakan terkait isu Papua. Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam membahas aspek strategis. Namun, fokus utama penelitian Ramdhan lebih terarah pada strategi kontra-pemberontakan (counter-

Insurgency) melalui pendekatan berlian McCormick dalam mengatasi konflik Internal antara pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan Papua. Sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti *strategi International Parliamentarians West Papua* (IPWP) dalam mempengaruhi dunia internasional. Penelitian kedua berjudul "*Strategi Organisasi Papua Merdeka dalam Mendapatkan Dukungan Internasional Tahun 2016–2020*" oleh Aditya Chairani Putri (2022), menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara komprehensif strategi yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam meraih dukungan dari komunitas internasional sepanjang periode 2016 hingga 2020. Melalui pendekatan analisis yang mendalam, penelitian ini menelusuri berbagai taktik dan langkah yang diterapkan OPM guna mendapatkan legitimasi serta dukungan dari lembaga-lembaga internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OPM berhasil memenuhi indikator dalam pendekatan *externalizing the contention*, yang meliputi konteks domestik, pembingkai isu (framing), serta bentuk aksi kolektif yang digunakan untuk memperjuangkan tujuannya di ranah global. OPM menggunakan strategi lembut dan non-kekerasan, berkolaborasi dengan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda, dan fokus pada lobi politik serta penyebaran kampanye propaganda internasional. ULMWP menggunakan tiga strategi utama: (1) menciptakan konteks domestik yang menarik perhatian internasional, (2) membingkai konten berita untuk menarik perhatian dunia, dan (3) membentuk tindakan kolektif dengan mendapatkan dukungan dari pihak internasional. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti negara Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Organisasi Internasional UNPO, OPM berhasil mendapatkan dukungan dan meningkatkan kesadaran internasional terhadap isu Papua Barat.

Berbeda dengan penelitian pertama yang menitikberatkan pada peran strategi negara dalam menangani konflik, penelitian kedua lebih menyoroti strategi organisasi separatis dalam membangun dukungan internasional. Fokusnya tidak terletak pada individu tertentu, melainkan pada pendekatan kelembagaan dan

strategi diplomatik non-negara. Sementara itu, Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis terhadap International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan strategi yang mereka gunakan untuk mempengaruhi opini publik serta dunia internasional terkait konflik Papua. Meskipun keduanya membahas strategi-strategi yang digunakan dalam konteks Papua, fokusnya berbeda dan menyoroti aspek yang berbeda pula dalam upaya mendapatkan dukungan internasional.

Penelitian ketiga berjudul *"The Papua Conflict: The Different Perspectives of the Indonesian Government and International Communities Review from the English School Theory"* oleh Mohamad Rosyidin, Andi Akhmad Basith Dir, dan Fendy Eko Wahyudi (2022), bertujuan untuk mengkaji konflik Papua Barat sebagai titik perbedaan pandangan antara pemerintah Indonesia dan komunitas internasional, terutama kelompok pendukung kemerdekaan Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis akar perbedaan persepsi dalam memahami konflik tersebut. Dengan menggunakan perspektif Mazhab Inggris dalam studi hubungan internasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang isu Papua dalam kerangka kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang mencerminkan pendekatan Pluralis. Sebaliknya, komunitas internasional—terutama negara-negara di kawasan Pasifik dan aktor masyarakat sipil global—memaknai konflik Papua sebagai persoalan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri, sejalan dengan pendekatan Solidaritas dalam teori Mazhab Inggris. Perbedaan penelitian, Penelitian ini lebih focus pada analisis akar penyebab perbedaan pendapat antara Indonesia dan komunitas internasional terkait isu konflik Papua. Menggunakan pendekatan Mazhab Inggris dalam hubungan internasional. Sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan strategi organisasi International parliamentarians west Papua (IPWP) dalam mempengaruhi opini dunia internasional terkait isu konflik Papua Barat.

Penelitian keempat berjudul *"Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia"* oleh Rany Purnama Hadi (2017) menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi perang informasi dan pendekatan non-

kekerasan yang dijalankan oleh gerakan separatis Papua. Penelitian ini menelusuri bagaimana pendekatan non-violent dan penggunaan media serta jaringan komunikasi global menjadi instrumen perjuangan dalam upaya memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui media online dan jaringan sosial, gerakan Papua Barat mempengaruhi masyarakat internasional untuk memberikan dukungan dan simpati terhadap perjuangan mereka. Strategi online ini kemudian menciptakan ranah dunia maya sebagai medan pertempuran opini antara gerakan Papua Barat dan pemerintah Indonesia.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang diambil dalam menganalisis perjuangan gerakan pemisahan diri Papua di Indonesia. Penelitian penulis, yang berjudul "Analisis Strategi International Parliamentarians West Papua dalam Mempengaruhi Opini Publik dan Dunia Internasional terkait Isu Konflik Papua," lebih menyoroti upaya para anggota parlemen internasional dari Papua Barat dalam mempengaruhi opini publik global dan pemangku kepentingan internasional. Sementara itu, penelitian kedua yang berjudul ""Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia" lebih fokus pada strategi perang informasi dan perjuangan non-kekerasan yang diadopsi oleh gerakan pemisahan diri Papua di Indonesia, dengan penekanan khusus pada penggunaan media online sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan dan memperkuat narasi perjuangan mereka. Penelitian kelima, berjudul "*Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka*", ditulis oleh Dimas Hutomo Sahanda (2020), juga menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara terperinci strategi diplomasi publik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons tekanan diplomatik dari negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua dan aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi publik Indonesia dalam menanggapi upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mencari simpati politik dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Dengan menganalisis konsep

diplomasi publik oleh Mark Leonard, penelitian ini mengklasifikasi langkah pemerintah Indonesia dalam manajemen berita, komunikasi strategis, dan pembangunan relasi dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang. Melalui media massa, Indonesia merespons tuduhan OPM dengan bantahan dan statistik kondisi Papua, serta mengembangkan narasi baru tentang identitas Melanesia di Indonesia. Upaya juga dilakukan melalui kerjasama dan pemberian beasiswa untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Hasilnya, diplomasi publik Indonesia bertujuan meningkatkan rasa kekeluargaan, penghargaan, pelibatan, dan pengaruh masyarakat dari negara lain terhadap Indonesia. Namun demikian, sangat penting untuk diingat bahwa diplomasi publik adalah strategi politik jangka panjang, dan karena ini adalah proses yang berkelanjutan, potensi dan kemungkinan Indonesia dalam diplomasi publik dengan negara-negara Asia Pasifik tetap terbuka meskipun ada beberapa kemenangan baru-baru ini.

Jika dibandingkan dengan Penelitian penulis, lebih menitikberatkan pada upaya International Parliamentarians West Papua dalam mempengaruhi opini publik dan dunia internasional terhadap konflik Papua, sementara penelitian ini lebih menyoroti strategi Indonesia dalam menjalankan diplomasi publiknya khususnya di wilayah Pasifik Selatan terkait Organisasi Papua Merdeka. Meskipun keduanya mengulas peran diplomasi dalam konteks konflik Papua, penelitian pertama lebih menekankan pada aksi individu politik West Papua di tingkat internasional, sementara penelitian kedua lebih mendalam dalam analisis strategi resmi Indonesia dalam menghadapi tantangan diplomasi regional yang terkait dengan konflik tersebut.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	"Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model	Tujuan dari penelitian ini untuk menginterpretasi	Kualitatif	Salah satu temuan penting dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa	Penelitian ini dengan penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
	Counterinsurgency (COIN)” Muhammad Angga Ramdhan Tahun 2021.	model COIN dengan memfokuskan ke lensa studi konflik dan hubungan internasional.		pendekatan kontra-pemberontakan (COIN) berbasis model McCormick terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik Papua. Sebaliknya, penerapan model ini justru membuka ruang munculnya dinamika baru di tingkat internasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pendekatan dengan menekankan pada penyelesaian akar konflik secara damai, bukan melalui kekuatan militer semata.	namun terdapat persamaan dalam hal mengungkap strategi yang digunakan terkait isu Papua. Baik penelitian penulis dengan penelitian ini membahas peran strategis akan tetapi, Untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam perjuangan internal antara pemerintah Indonesia dan pasukan pro-kemerdekaan Papua, penelitian ini lebih berfokus pada taktik kontra-pemberontakan berdasarkan model berlian McCormick .Sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti strategi International Parliamentarians West Papua (IPWP) dalam mempengaruhi dunia internasional.
2.	“Strategi Organisasi Papua Merdeka Dalam Mendapatkan Dukungan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh	Kualitatif	Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menggunakan	Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis terhadap

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
	Internasional Tahun 2016-2020” (Aditya Chairani Putri, 2022).	organisasi Papua Merdeka dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan internasional selama periode tahun 2016 hingga 2020.		metode eksternalisasi perselisihan berhasil memenuhi indikator metode konteks dalam negeri, membingkai perselisihan, dan bentuk aksi kolektif. OPM menggunakan strategi non-kekerasan, berkolaborasi dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda, dan fokus pada lobi politik dan kampanye propaganda internasional. ULMWP menggunakan tiga strategi utama: menciptakan konteks domestik yang menarik untuk menarik perhatian internasional, menyusun konten berita untuk menangkap kepentingan global, dan membentuk aksi kolektif dengan menggalang dukungan dari pihak internasional. Melalui kemitraan Melalui pelbagai organisasi seperti negara Vanuatu, Kepulauan Solomon, serta Organisasi Internasional UNPO, OPM berhasil memperoleh dukungan	<i>International Parliamentarians for West Papua (IPWP)</i> dan strategi yang mereka gunakan untuk mempengaruhi opini publik serta dunia internasional terkait konflik Papua. Sementara itu, penelitian ini lebih mengeksplorasi Taktik yang dijalankan oleh kelompok Papua Merdeka dalam meraih dukungan dari komunitas internasional., tanpa fokus khusus pada peran individu seperti yang dibahas dalam penelitian pertama. Meskipun keduanya membahas strategi-strategi yang digunakan dalam konteks Papua, fokusnya berbeda dan menyoroti aspek yang berbeda pula dalam upaya mendapatkan dukungan internasional.

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
				dan meningkatkan pengaruh.kesadaran internasional mengenai masalah West Papua.	
3.	“The Papua Conflict:The Different Perspectives Of The Indonesian Government And International Communities Review From The English School Theory”(Mohamad Rosyidin,Andi Akhmad Basith Dir,& Fendy Eko Wahyudi,2022).	Penelitian ini bertujuan menganalisis isu papua barat yang menjadi titik singgung konflik antara Indonesia dan komunitas internasional yang menjadi akar penyebab perbedaan pandangan konflik papua barat yang mana antar Indonesia dan pihak-pihak pendukung kemerdekaan papua barat.	Kualitatif	Dalam kerangka hubungan internasional, penelitian ini menggunakan perspektif Mazhab Inggris. Indonesia membingkai konflik Papua melalui narasi kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi, yang selaras dengan pendekatan Pluralis. Sementara itu, negara-negara Pasifik dan aktor masyarakat sipil internasional justru memandang konflik tersebut melalui sudut pandang hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri, yang mencerminkan pandangan dari aliran Solidaritas.	Penelitian ini lebih focus pada analisis akar penyebab perbedaan pendapat antara Indonesia dan komunitas internasional terkait isu konflik papua. Menggunakan pendekatan Mazhab inggris dalam hubungan internasional. Sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan strategi organisasi International parliamentarians west papua (IPWP) dalam mempengaruhi opini dunia internasional

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
					terkait isu konflik papua barat.
4.	"Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia" (Rany Purnama Hadi, 2017).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara cermat mengeksplorasi, menganalisis, dan mendalami strategi perang informasi serta perjuangan non-violent yang diadopsi oleh gerakan pemisahan diri Papua di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penggunaan media online sebagai alat utama dalam mengartikulasikan aspirasi, menyebarkan pesan, serta memperkuat narasi perjuangan mereka.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui media online dan jaringan sosial, gerakan Papua Barat mempengaruhi masyarakat internasional untuk memberikan dukungan dan simpati terhadap perjuangan mereka. Strategi online ini kemudian menciptakan ranah dunia maya sebagai medan pertempuran opini antara gerakan Papua Barat dan pemerintah Indonesia.	Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang diambil dalam menganalisis perjuangan gerakan pemisahan diri Papua di Indonesia. Penelitian penulis, yang berjudul "Analisis Strategi <i>International Parliamentarians West Papua</i> dalam Mempengaruhi Opini Publik dan Dunia Internasional terkait Isu Konflik Papua," lebih menyoroti upaya para anggota parlemen internasional dari Papua Barat dalam mempengaruhi opini publik global dan pemangku kepentingan internasional. Sementara itu,

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
					penelitian kedua yang berjudul ""Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia" lebih fokus pada strategi perang informasi dan perjuangan non-kekerasan yang diadopsi oleh gerakan pemisahan diri Papua di Indonesia, dengan penekanan khusus pada penggunaan media online sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan dan memperkuat narasi perjuangan mereka.
5.	“Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka” (Dimas Hutomo Sahanda, 2020).	Penelitian ini bertujuan untuk merinci serta menganalisis secara mendalam strategi yang diimplementasikan. Tantangan diplomatik yang dihadapi Indonesia dengan berbagai negara di kawasan Kepulauan Pasifik membutuhkan strategi yang tepat., khususnya dalam	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi publik Indonesia dalam menanggapi upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk Meraih simpati politik dari negara-negara dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Mengacu pada perspektif diplomasi publik oleh Mark Leonard, studi ini mengelompokkan langkah-langkah	Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada upaya <i>International Parliamentarians West Papua</i> dalam mempengaruhi opini publik dan dunia internasional terhadap konflik Papua, sementara penelitian ini lebih menyoroti strategi Indonesia dalam menjalankan

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan
		konteks hubungannya dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).		pemerintah. Indonesia dalam Pengelolaan informasi, komunikasi strategis, dan membangun hubungan bertujuan untuk pencapaian optimal. membangun hubungan jangka panjang. Melalui media massa, Indonesia merespons tuduhan OPM dengan bantahan dan statistik kondisi Papua, serta mengembangkan narasi baru tentang identitas Melanesia di Indonesia. Upaya juga dilakukan melalui kerjasama dan pemberian beasiswa untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Hasilnya, diplomasi publik Indonesia bertujuan meningkatkan rasa kekeluargaan, penghargaan, pelibatan, dan pengaruh masyarakat dari negara lain terhadap Indonesia.	diplomasi publiknya khususnya di wilayah Pasifik Selatan terkait Organisasi Papua Merdeka. Meskipun keduanya mengulas peran diplomasi dalam konteks konflik Papua, penelitian pertama lebih menekankan pada aksi individu politik West Papua di tingkat internasional, sementara penelitian kedua lebih mendalam dalam analisis strategi resmi Indonesia dalam menghadapi tantangan diplomasi regional yang terkait dengan konflik tersebut.

2.2 Landasan Konseptual

Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Network (TAN) merupakan jaringan aktor yang beroperasi lintas negara dengan fokus pada isu-isu tertentu yang dilandasi oleh nilai-nilai, wacana, dan pertukaran informasi

yang serupa. Para aktor dalam jaringan ini bekerja secara kolektif dan terorganisir untuk mengangkat isu-isu baru, mempromosikan norma sosial, serta mendorong perubahan kebijakan melalui advokasi. Keunikan dari jaringan ini terletak pada kemampuannya untuk menggalang dukungan tanpa mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi. Sebaliknya, kekuatan TAN berasal dari solidaritas, jaringan informasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai bersama yang mereka perjuangkan.

Keck dan Sikkink menekankan bahwa jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting dalam mendukung dan memperjuangkan isu-isu yang diperjuangkan oleh aktor lainnya. Mereka memfasilitasi kolaborasi antarindividu maupun organisasi dalam mempromosikan ide, norma, dan kebijakan tertentu. Isu-isu yang menjadi perhatian TAN umumnya berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kesehatan, masyarakat adat, dan isu-isu sosial lainnya. Meskipun tidak memiliki kekuatan koersif seperti senjata atau pengaruh ekonomi, aktor-aktor TAN mampu memperkuat posisi mereka secara global berkat konsistensi dan perluasan pengaruhnya dari waktu ke waktu. Ciri khas utama dari jaringan ini adalah pendekatannya yang berbasis nilai-nilai universal dan misi kemanusiaan yang menyatukan berbagai latar belakang budaya dan nasional.

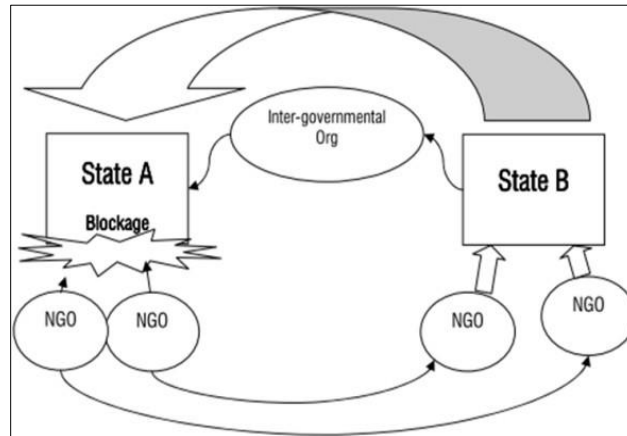
Keck dan Sikkink juga memperkenalkan salah satu pola yang dikenal sebagai Boomerang Pattern, yang menggambarkan bagaimana aktor lokal yang terhambat oleh pemerintahnya dapat meminta bantuan aktor internasional untuk memberikan tekanan kembali kepada negara tersebut agar terjadi perubahan kebijakan. Dalam konteks interaksi ini, salah satu tokoh penting yang terlihat adalah jaringan advokasi level internasional. yang berperan pada tingkat transnasional, regional, maupun domestik. Jaringan ini terdiri dari para ahli, ilmuwan, dan aktivis yang bekerja secara sukarela. Transnational Advocacy Network (TAN) merujuk pada kelompok advokasi mandiri yang beroperasi lintas batas negara dengan tujuan memperjuangkan kepentingan yang dianggap mewakili kepentingan publik secara lebih luas. (Sikkink m. E., 1998).

Konsep, konvensi, dan wacana yang berkembang selama proses diskusi dan memberikan informasi yang signifikan, semuanya termasuk dalam arsitektur jaringan advokasi transnasional. Para aktor dalam TAN juga memberikan tekanan kepada para legislator dan berperan sebagai pengawas. Hubungan yang terjalin terutama berupa pertukaran informasi, yang memungkinkan aktor-aktor internasional non-tradisional memobilisasi informasi secara strategis untuk membangun isu, mempengaruhi, dan memberikan tekanan kepada organisasi serta pemerintah demi memperluas pengaruh. Jaringan ini terorganisasi untuk mengedepankan suatu isu, ide, atau norma tertentu. Umumnya, jaringan advokasi melibatkan sejumlah kecil aktivis dari organisasi dan lembaga yang fokus pada kampanye atau advokasi tertentu. Meskipun komunitas yang mereka bantu terkadang berpartisipasi dalam protes, upaya mereka jarang melibatkan mobilisasi yang luas di luar acara-acara penting. Strategi advokasi jaringan ini, yang membawa isu-isu khusus seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perempuan, kesehatan, masyarakat adat, dan kemanusiaan, adalah hal yang membuatnya berbeda. Organisasi advokasi menyediakan platform bagi pandangan orang-orang yang kurang beruntung untuk didengar ketika pemain konvensional, seperti negara, adalah satu-satunya yang memiliki akses ke proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, TAN mengangkat isu-isu dari masyarakat agar menjadi perhatian publik dan pengambil kebijakan.

Menurut konsep Transnational Advocacy Network, terdapat tujuh jenis aktor utama yang berkontribusi dalam jaringan ini. Keck dan Sikkink mengelompokkan aktor tersebut menjadi: (1) organisasi non-pemerintah baik domestik maupun internasional, serta lembaga riset dan advokasi, (2) gerakan sosial lokal, (3) yayasan, (4) media massa, (5) lembaga keagamaan, kelompok perdagangan, dan intelektual, (6) bagian dari organisasi pemerintah, serta (7) elemen dalam eksekutif atau parlemen. Tidak semua aktor tersebut harus hadir untuk membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional; hanya dengan beberapa aktor saja jaringan sudah dapat berjalan efektif. Dalam konsep TAN, pemerintah, pelaku aktivitas, dan gerakan sosial lokal memegang peran paling besar. Namun, seringkali aktor-aktor dalam jaringan ini menghadapi hambatan untuk masuk ke dalam arena politik

domestik sebuah negara. Oleh karena itu, mereka mengandalkan koneksi internasional guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pola hubungan seperti inilah yang oleh Keck dan Sikkink dinamakan sebagai "Pola Boomerang."



Gambar : 2.1 Pola Boomerang

Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998).

Model interaksi antar aktor dalam *Transnational Advocacy Network* (TAN) dikenal dengan istilah Pola Boomerang. Pola ini muncul ketika jalur aspirasi para aktor domestik dalam sebuah negara terhalang untuk disampaikan langsung kepada pemerintahnya. Karena kendala tersebut, aktor-aktor ini kemudian membangun koneksi dengan aktor internasional guna mencari dukungan serta memperjuangkan isu yang diangkat, sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah dari luar negeri.

Keck dan Sikkink mengklasifikasikan empat strategi utama yang digunakan TAN dalam menjalankan advokasi. Pertama, *Information Politics* adalah kemampuan menyebarkan informasi politik secara cepat dan terpercaya ke tempat-tempat yang memiliki pengaruh besar. Kedua, *Symbolic Politics* mengacu pada penggunaan simbol, aksi, atau cerita yang menggambarkan kondisi tertentu dan mampu menarik perhatian publik luas. Ketiga, *Leverage Politics* adalah upaya mendapatkan bantuan dari aktor berpengaruh untuk memperkuat jaringan advokasi yang biasanya memiliki kekuatan terbatas. Terakhir, *Accountability Politics* merupakan cara menekan pihak yang berkuasa agar tetap mematuhi kebijakan atau prinsip yang telah disepakati sebelumnya. Keempat strategi ini menjadi kerangka

analisis untuk melihat proses advokasi yang dilakukan oleh *International Parliamentarians West Papua* (IPWP) dalam mengangkat isu konflik Papua ke ranah internasional.

Dari keempat pendekatan tersebut, IPWP aktif Menggunakan Information Politics, Symbolic Politics, serta Leverage Politics untuk membentuk opini dan mendapatkan dukungan baik dari aktor negara maupun non-negara (Keck & Sikkink, 1999). Namun, dalam hal Accountability Politics, IPWP belum berhasil menerapkan strategi ini karena tidak ada perubahan kebijakan oleh pemerintah Indonesia mengenai kemerdekaan Papua Barat. Berdasarkan pemaparan konsep *Transnational Advocacy Network*, maka konsep ini akan digunakan peneliti dalam menganalisis strategi IPWP dalam mengadvokasi dunia internasional terkait isu konflik Papua.

2.3 Model Kerangka Pemikiran

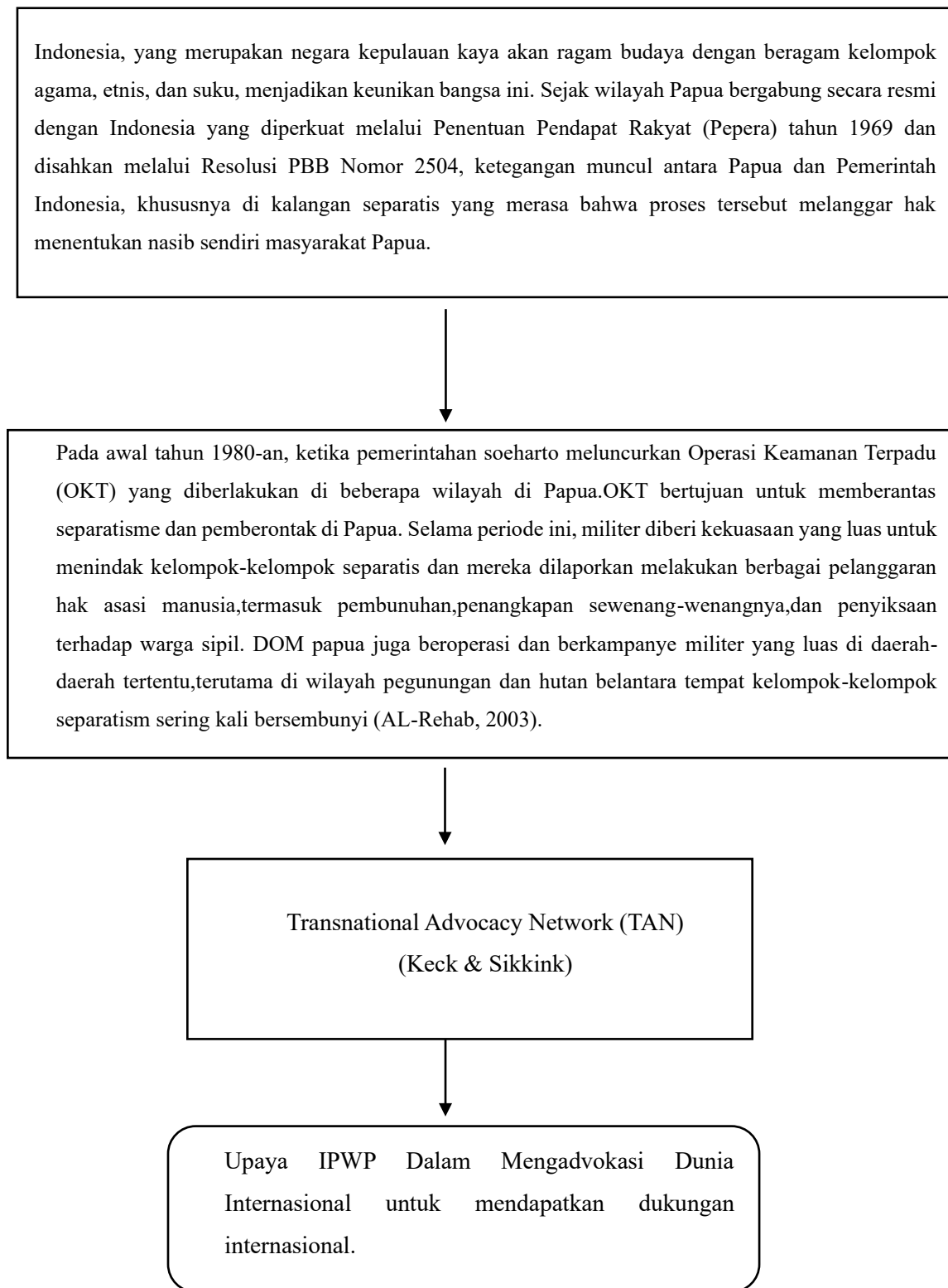
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman agama, etnis, dan suku bangsa yang menjadi karakteristik unik bangsa ini. Provinsi Papua, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, dahulu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan kemudian menjadi wilayah kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan Nugini Belanda. Hubungan antara Papua dan pemerintah Indonesia telah tegang sejak Papua Barat bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963.

Di bawah Perjanjian New York tahun 1962, Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia. Perjanjian ini diperkuat pada tahun 1969 dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan disetujui oleh PBB dalam Resolusi PBB No. 2504. Namun, organisasi-organisasi separatis berpendapat bahwa perjanjian dan prosedur ini melanggar hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Mereka berargumentasi bahwa proses penentuan tersebut seharusnya dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung, bukan hanya melalui perwakilan yang jumlahnya sangat kecil, yakni sekitar 0,2% dari total populasi Papua pada saat itu,

yang juga dinilai mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak Indonesia. (Pamungkas, 2017).

Salah satu periode paling intensif adalah DOM (Daerah Operasi Militer) yang diberlakukan pertama kali pada tahun 1969 untuk menanggapi perlawanan terhadap hasil pepera dan untuk menegaskan otoritas pemerintah di wilayah tersebut. (Ardli Johan Kusuma, 2022). Pada awal tahun 1980-an, ketika pemerintahan Soeharto meluncurkan Operasi Keamanan Terpadu (OKT) yang diberlakukan di beberapa wilayah di Papua. OKT bertujuan untuk memberantas separatisme dan pemberontak di Papua. Selama periode ini, militer diberi kekuasaan yang luas untuk menindak kelompok-kelompok separatis dan mereka dilaporkan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap warga sipil. DOM Papua juga beroperasi dan berkampanye militer yang luas di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah pegunungan dan hutan belantara tempat kelompok-kelompok separatisme sering kali bersembunyi (AL-Rehab, 2003). Dengan demikian, konflik Papua ini menjadi perhatian di dunia internasional hingga terbentuknya *International Parliamentarians West Papua* (IPWP). Dalam menjawab rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep, *Transnational Advocacy Network* (TAN), sebagai landasan dalam melakukan serangkaian analisis tentang strategi *International Parliamentarians West Papua* (IPWP) dalam mengadvokasi Dunia Internasional.

Peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan posisi IPWP sebagai salah satu organisasi internasional yang aktif menyuarakan dan mengadvokasi konflik Papua terutama, terkait persoalan hak asasi manusia di forum internasional. Penelitian ini menggunakan empat strategi utama dari *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai landasan analisis, yaitu politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, guna memperoleh perhatian dan dukungan dari komunitas internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diarahkan untuk memberikan kesimpulan tentang efektivitas strategi yang digunakan oleh *International Parliamentarians West Papua* (IPWP) dalam mengadvokasi isu konflik Papua di tingkat global.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran , Diolah oleh Peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung dari para aktivis, aktor terkait, serta lokasi yang menjadi fokus penelitian. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, serta refleksi peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan fleksibel, dengan cakupan subjek yang terbatas namun memungkinkan perkembangan pemahaman secara dinamis sesuai konteks penelitian (Indrus, 2009, hlm. 23-27).

Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan membandingkan hasil temuan lapangan dengan kajian teori yang relevan dari literatur. Sejalan dengan pendekatan ini, data dan pembahasan yang akan disajikan akan fokus pada strategi yang digunakan oleh para parlemen internasional terkait Papua Barat dalam mengadvokasi dunia internasional mengenai konflik Papua, dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap dinamika konflik tersebut. Metode penyajian data yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mampu menyajikan data dengan rinci dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu masalah, gejala, fakta, dan peristiwa. Dengan memanfaatkan teknik ini, analisis tentang strategi para parlemen internasional di wilayah Papua Barat dalam mengadvokasi dunia.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini pada strategi yang digunakan oleh para parlemen internasional, atau IPWP dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pendekatan yang digunakan oleh para pemimpin dan anggota parlemen dalam mempromosikan kepentingan Papua Barat di tingkat global. Pendekatan ini mencakup upaya diplomasi, advokasi, media, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat dukungan internasional terhadap upaya penyelesaian konflik di Papua Barat.

Dengan memahami strategi-strategi ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana upaya internasional dapat berperan dalam memengaruhi perubahan positif dalam penanganan konflik dan peningkatan kesadaran global terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Papua Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dari beragam sumber yang terpercaya, mencakup buku, jurnal ilmiah, media online, situs resmi pemerintah, media sosial, dan situs resmi lainnya. *International Parliamentarians West Papua* (IPWP), serta sumber-sumber kredibel lainnya. Dalam konteks ini, data sekunder digunakan untuk menganalisis peran IPWP terkait dengan isu konflik di Papua Barat, serta bagaimana hal tersebut mengadvokasi pandangan dunia internasional. Sebagai contoh, data tersebut mungkin mencakup rekaman pernyataan publik, laporan dari organisasi internasional, atau artikel penelitian terkait yang telah dipublikasikan sebelumnya. (Sujarweni, 2014).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen terkait lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dan mengolah data yang relevan guna mendukung analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian (Zed, 2002). Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang tersedia, peneliti berupaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana para parlemen internasional, secara khusus, terlibat dalam upaya IPWP dalam mengadvokasi duni internasional terkait dengan isu-isu konflik di wilayah Papua. Dengan memanfaatkan literatur yang relevan, diharapkan dapat terungkap secara komprehensif strategi apa yang telah digunakan, bagaimana strategi-strategi tersebut diimplementasikan, dan dampak yang dihasilkan dari upaya-upaya tersebut.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menggunakan data sebagai landasan penelitian, teknik analisis data adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menilai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, makalah, publikasi, dan sebagainya. Temuan peneliti yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data.

Menurut Alan Bryman dan Robert G. Burgess (2018), analisis data kualitatif melibatkan proses mendeteksi, mendefinisikan, mengkategorikan, menjelaskan, serta memetakan data secara mendalam dalam suatu rangkaian analisis yang sistematis. Dengan kata lain, analisis kualitatif berfokus pada identifikasi elemen-elemen penting dan melaksanakan berbagai tugas seperti mendefinisikan konsep, mengelompokkan data, menjelaskan fenomena yang muncul, serta menjelajahi dan memetakan fenomena tersebut secara menyeluruh. Fungsi utama dari analisis ini

adalah untuk merumuskan konsep, menguraikan sifat dan dinamika fenomena, membangun tipologi, menemukan penjelasan baik yang tersurat maupun tersirat, serta mengembangkan ide maupun teori baru (Bryman & Burgess, 2018).

Selanjutnya, Miles dan Huberman mengemukakan tahapan dalam analisis data kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah ini mencakup proses penyaringan, pemfokusan, dan penyederhanaan data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih jelas dan terstruktur. Data kualitatif dapat direduksi melalui seleksi yang cermat, parafrase, serta pengorganisasian data ke dalam pola-pola tertentu (Emzir, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan seleksi dan pengelompokan data berdasarkan relevansinya terhadap topik agar memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.

2. Pemaparan Data (*Data Display*)

Pemaparan data adalah tahapan penyusunan dan pengorganisasian hasil temuan dalam bentuk narasi, grafik, matriks, atau representasi lain yang mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Penyajian ini bertujuan untuk memperjelas temuan penelitian sehingga proses penarikan kesimpulan menjadi lebih sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/Verifying*)

Tahap ini merupakan hasil akhir dari analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Kesimpulan disusun secara deskriptif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang objek studi.